

# LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



**PT. BPR HANEDA MITRA USAHA**  
Bukit Duri Plaza Blok B No.2-3  
Jl.Jatinegara Barat No.54 E, Jakarta Timur  
Telp (021) 28 00005 Faks (021) 85910918



## DAFTAR ISI TATA KELOLA PERUSAHAAN BPR HANEDA MITRA USAHA

Daftar isi .....	1
Pendahuluan .....	
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR .....	
Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR .....	2
<b>A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR.....</b>	<b>2</b>
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> .....	2
a Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi .....	2
b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite .....	5
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	7
d Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	8
e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> ) .....	9
f Rencana Strategi Bank .....	10
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	12
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi .....	12
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	12
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi .....	13
5 Shares Option .....	14
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	14
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	14
8 Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> ) .....	14
9 Permasalahan Hukum .....	15
10 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	15
11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15
<b>B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>15</b>

### LAMPIRAN

1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
---	--



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## BPR HANEDA MITRA USAHA

### TAHUN 2016

#### PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, BPR Haneda Mitra Usaha (BPR Haneda) menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Haneda antara lain untuk :

- a. Mendukung visi BPR Haneda yaitu Menjadi “BPR yang sehat, tumbuh dan terdepan dalam layanan jasa keuangan”.



- b. Mendukung misi ke 5 BPR Haneda yaitu Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kebijakan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan nasabah, karyawan, pengurus dan pemegang saham.
- c. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- e. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- f. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- g. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

#### **A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

##### **1. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :**

##### **a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab dewan Komisaris dan Direksi.**

a.1. Sampai dengan akhir tahun 2016 Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan GCG yang diharapkan, sementara Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan yaitu :

1. Dewan Komisaris berjumlah 1 (satu) orang dan Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang yaitu ::

- Komisaris Utama : Putri Zulya Savitri, S.Mn.,M.Bus.
- Direktur Utama : Achmad Bukkori S.Si.
- Direktur : Rinto Suryanto, S. St.Pi.

2. Komisaris Utama lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) namun belum memiliki sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

3. Setiap Dewan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).



4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  5. Komitmen kami untuk pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris adalah :
    - i. Memenuhi ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris paling lambat akhir bulan September 2017.
    - ii. Komisaris Utama memiliki sertifikasi kompetensi Dewan Komisaris BPR paling lambat akhir bulan September 2017
- a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi
- 1) Tugas dan tanggungjawab Dewan komisaris
    - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
    - Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
    - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
    - Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
    - Dewan Komisaris belum membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
    - Dewan Komisaris sudah meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan tahun pemeriksaan 2016.
    - Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan



persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

## 2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan pengawas Otoritas Jasa Keuangan terkait hasil audit tahun 2015, dikarenakan keterbatasan kemampuan direksi dan perusahaan yaitu perusahaan belum menyesuaikan gaji beberapa karyawan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

### a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2016
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.



- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
- Persetujuan RKAT tahun 2016
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.

**b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite.**

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015, BPR Haneda belum memiliki komite – komite.

**c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

c.1. fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan belum di sahkan melalui RUPS tahun 2016.
- BPR Haneda belum mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan, tugas dan wewenang serta fungsi kepatuhan sementara ditangani oleh direktur.
- BPR Haneda berkomitmen untuk memenuhi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan dalam hal Kepatuhan sebagai berikut :
  - Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan akan di usulkan melalui pengesahan RUPS tahun 2017.
  - Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan akan dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2017.
  - Pedoman kerja yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Kepatuhan akan selesai paling lambat bulan Maret 2017.



#### c.2. Fungsi audit intern

- BPR Haneda belum mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal. Tugas dan wewenang serta fungsi Audit Internal sementara di bawah pengawasan Direktur Utama
- BPR Haneda berkomitmen untuk memenuhi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan dalam hal Audit Internal sebagai berikut :
  - Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal akan dilaksanakan paling lambat bulan Maret 2017.
  - Pedoman kerja yang mengatur tugas dan wewenang Pejabat Eksekutif Audit Internal akan selesai paling lambat bulan Maret 2017.

#### c.3. Fungsi Audit Ekstern

Pada tahun 2016 BPR Haneda Mitra Usaha belum menunjuk Audit Eksternal karena asset pada saat itu masih kurang dari 10 Milyar (< 10 Milyar).

#### **d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

Tahun 2016, BPR Haneda belum menerapkan Manajemen Risiko secara terstruktur, massif dan belum memiliki dokumentasi yang baik dalam memantau risiko, termasuk didalamnya Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian Internal bank masih dilakukan oleh Direktur Utama yang dibantu Kepala Bagian Operasional. Kemudian hasil dari pengendalian internal tersebut dibahas dalam rapat pembinaan dan pengawasan bersama Dewan Komisaris.

Namun BPR Haneda berkomitmen untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern yang sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan akan mulai di terapkan pada tahun 2017 ini. Sementara untuk penerapan Manajemen Risiko untuk semua jenjang Risiko baik Risiko





Kredit, Operasional dan Kepatuhan akan kami terapkan pula di tahun 2017.

**e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK.**

BPR Haneda berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan penyaluran dana, termasuk penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Haneda Mitra Usaha.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2016 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (RIBUan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	1	23.958
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	1	7.733
	b. Group	1	18.998

**f. Rencana Strategis Bank**

**f.1. Rencana jangka pendek tahun 2017**

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Potensi pertumbuhan industri BPR yang masih tinggi.
- Potensi pangsa pasar kredit usaha mikro dan kecil masih luas.



- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Cepatnya perkembangan teknologi khususnya Financial Technology.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR Haneda jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada pengembangan Kredit Modal Kerja untuk Mikro dan Menengah. Target pertumbuhan sebesar 109% dan rasio LDR sebesar 79,25%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR Haneda.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp 4.478.366 ribu (atau 86,87%) dan tabungan sebesar Rp 558.013 ribu (atau 56,98%) dari tahun 2016.
- Menurunkan rasio NPL dan penyelesaian kredit bermasalah dengan tepat, cepat dan sesuai prosedur yang berlaku.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- Optimalisasi peran [www.bprhaneda.co.id](http://www.bprhaneda.co.id) untuk meningkatkan pelayanan dan citra serta pemasaran produk bank.
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.



f.2. rencana jangka menengah tahun 2017

1) Finansial

- Tahun 2017 sebagai tahun pertumbuhan agresif BPR Haneda dengan target ROE diatas 10%.
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2) Customer

- Secara konsisiten meningkatrkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 20 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan BPR Haneda Mitra Usaha

3) Karyawan

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM BPR Haneda Mitra Usaha melalui *Competency Based Human Resouces Management*.

**g. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

BPR Haneda Mitra Usaha terus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparansi baik dalam hal kondisi keuangan maupun non keuangan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.



2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank belum disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan akan disajikan dalam homepage [www.bprhaneda.co.id](http://www.bprhaneda.co.id).
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi BPR Haneda tidak memiliki saham pada BPR Haneda, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR Haneda	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	Bidang Usaha
Futri Zulya Savitri	Komisaris Utama	Tidak ada	Presiden Direktur	Perdagangan Umum
Achmad Bukkori	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada
Rinto Suryanto	Direktur	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

## 3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama BPR Haneda tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Seluruh anggota Direksi BPR Haneda tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

### b. Hubungan Keluarga

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu anak kandung dari PSP sedangkan Direksi BPR Haneda tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan



derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Futri Zulya Savitri	Komisaris Utama		√		√	√			√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga						Hubungan Keuangan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Achmad Bukkori	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Rinto Suryanto	Direktur		√		√		√		√		√		√

#### 4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2016 sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2016 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	1	Rp 65.000 ribu	2	Rp 240.500 ribu
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	1	Rp 4.981 ribu	2	Rp 61.449 ribu

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :



Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	1 orang

## 5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

## 6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,80 %
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,32 %
- rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,86 %
- rasio gaji direksi tertinggi dan komisaris tertinggi = 2,14 %
- rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2,80 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 5.344 ribu	Rp 5.344 ribu
2	Direksi	Rp 11.489 ribu	Rp 8.643 ribu
3	Pegawai	Rp 4.096 ribu	Rp 2.200 ribu

## 7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam setahun.



## 8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Haneda Mitra Usaha selama tahun 2016 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tdk Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dlm Proses penyelesaian internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Blm diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah di Tindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

## 9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Haneda Mitra Usaha, selama tahun 2016 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0



## 10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam ribuan)	Keterangan *)
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	Tidak ada

## 11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2016, BPR Haneda Mitra Usaha tidak memberikan dana untuk kegiatan kepentingan social dan kegiatan politik.

### B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Haneda Mitra Usaha periode Desember 2016, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi GCG sebesar 2.09 dengan prediksi Cukup Baik
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Sebelum Man.Risiko	Sesudah Man.Risiko
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	0,33	0,30
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	0,30	0,27
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,33	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	0,41	0,37
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,46	0,42
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,14	0,13
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0,00	0,00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposure</i> )	0,08	0,08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	0,10	0,09
11	Rencana Strategis Bank	0,16	0,14
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>2,32</b>	<b>2,09</b>
	<b>Prediksi Komposit</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>Cukup Baik</b>





c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Struktur organisasi BPR Haneda masih cukup sederhana, diharapkan penerapan GCG di BPR Haneda dapat terpantau dengan baik dan sesuai ketentuan.
- Terjaganya kondisi BMPK memberikan dampak positif bagi BPR Haneda, diharapkan kondisi ini terus terjaga dengan baik.
- BPR Haneda diharapkan terus menunjukkan transparansi keuangan dan non keuangan sebagai acuan untuk para stakeholder dan menjaga kepercayaan dari semua pihak.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Haneda Mitra Usaha tahun buku 31 Desember 2016.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.



## **PENUTUP**

Demikian laporan Tata Kelola Perusahaan ini kami susun dengan mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi BPR Haneda, kami sadari tahun 2016 masih banyak kekurangan dan kelemahan dan akan kami perbaiki untuk tahun 2017 ini, demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Haneda Mitra Usaha

Futri Zulya Savitri, S.Mn., M.Bus.  
Komisaris Utama

Achmad Bukkori, S.Si.  
Direktur Utama